



Contents lists available at [Journal IICET](#)

JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)

ISSN: 2502-8103 (Print) ISSN: 2477-8524 (Electronic)

Journal homepage: <https://jurnal.iicet.org/index.php/jppi>



Agama dalam pelaksanaan dan kemenangan pemilu pilpres, sebagai sebuah realitas politik di Indonesia

Indar Arifin

Departemen Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Hasanuddin, Indonesia

Article Info

Article history:

Received May 13th, 2022

Revised Sep 28th, 2022

Accepted Oct 31st, 2022

Keyword:

Pemilu pilpres,
Realitas politik,
Agama Islam

ABSTRACT

Studi ini didasarkan pada argumen bahwa agama adalah instrument yang sangat berpengaruh dalam membentuk suatu tindakan masyarakat. Agama adalah hal yang sangat sensitif dalam kehidupan masyarakat, apalagi masyarakat Indonesia yang sebagian besar adalah umat beragama Metode penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif, menggambarkan proses penelitian ini bedarkan dari hasil studi pustaka berupa buku, hasil riset lembaga survey dan konsultan politik. Ekspresi agama dalam politik tampaknya sangat menarik dalam diskursus ilmiah, karena terbukti ikut memainkan peran di dalam pertarungan politik nasional di Indonesia. Islam bahkan menjadi anak emas (masa keemasan) pasca reformasi dan terlihat kelompok islam memiliki kesempatan besar untuk mengekspresikan kekuatan politik mereka dengan mengartikulasikan agama di ruang publik (politik) di negeri yang berpenduduk muslim terbesar di dunia. Demokrasi dan Agama (Islam) di Indonesia tentu tidak berjalan secara instan tanpa proses yang panjang. Tentu banyak tokoh yang ikut serta memberi kontribusi terhadap penegakan demokrasi di Indonesia, dan membingkai Indonesia sebagai Negara yang tidak anti demokrasi meskipun memiliki populasi Muslim yang terbesar.



© 2022 The Authors. Published by IICET.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

Corresponding Author:

Indar Arifin,
Universitas Hasanuddin
Email: indararifinunhas@gmail.com

Pendahuluan

Dalam masyarakat demokratis, negara adalah arbiter antara bagaimana nilai yang berbeda harus didamaikan (Steiner, 2018). Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtstaat) dengan menganut sistem pemerintahan demokrasi, yang artinya pemegang kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat namun tetap dalam koridor hukum. Bagi masyarakat, demokrasi di Indonesia masih berada pada jalur yang benar dengan instrumen dan institusi demokrasi yang berkembang selama ini. Secara umum perkembangan demokrasi, kecenderungan tersebut telah memberikan kontribusi terhadap tahapan perkembangan demokrasi dari tahap transisi menuju konsolidasi (Hara & Trihartono, 2019). Secara yuridis, hal ini tertuang pada pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dinyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” (Hermawan, 2020). Terselenggaranya Pemilihan Umum di Negara Indonesia merupakan bukti nyata eksistensi demokrasi dalam sistem pemerintahan Indonesia. Tujuan dari dilaksanakannya Pemilihan Umum itu sendiri adalah agar dapat memilih anggota-anggota legislatif yang kelak akan membangun Indonesia baik secara fisik maupun non-fisik melalui produk produk hukum seperti kebijakan (policy) (Pulungan, Rahmatunnisa, & Herdiansah, 2020).

Pasca reformasi, demokrasi di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Indikator utama dalam demokrasi adalah suksesi pemerintahan baik eksekutif maupun legislatif melalui Pemilu yang bebas dan jujur (Aprilia, 2021).

Pasca Orde Baru, pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung (Yanuarti, 2018). Secara yuridis, Indonesia telah melakukan empat kali pemilu pasca reformasi. Pada 2009 menggunakan empat undang-undang untuk dijadikan landasan dalam menjalankan pemilu. Setelah itu tahun 2014 merupakan pemilu terakhir sebelum terjadi perubahan sistem pemilu pada tahun 2019. Perubahan sistem pemilu pada tahun 2019 dilatar belakangi oleh adanya permohonan yang diajukan oleh Effendi Ghazali bersama masyarakat untuk menguji materi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Pada tanggal 23 Januari 2014, Mahkamah Konstitusi akhirnya mengeluarkan putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 yang mengabulkan sebagian permohonan uji materi tersebut. MK menyatakan Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 UU Nomor 42/2008 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (Mahmudah, Mubarak, & Himmah, 2021).

Salah satu permasalahan aktual yang selalu muncul dalam wacana pemikiran Islam sepanjang sejarah umat Islam adalah politik. Islam seolah-olah tidak dapat dipisahkan dari politik, baik dalam kajian doktrinal normatifnya maupun dalam makna historisnya. Secara normatif, Islam memberikan petunjuk-petunjuk umum atau global yang bersifat langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan masalah politik, baik secara umum maupun secara luas dan dalam arti khusus kenegaraan/partai. Tetapi harus diperhatikan bahwa Al-Qur'an dan hadits adalah sama dan bagaimana yang paling cocok untuk mengatur masyarakat atau umat. Bahkan dua sumber Islam yang otentik tidak memberikan legitimasi formal tentang perlunya sebuah partai politik/sistem ketatanegaraan sebagai wadah untuk mengatur kepentingan umat Islam dan menjamin kelangsungan hidup Islam (Akil, Lamba Sultan, Syamsuddin, & Sabri, 2019). Al-Qur'an memberikan contoh bagaimana berperilaku dalam politik. Al-Qur'an membimbing orang dengan mengikuti prinsip keadilan dan keadilan dalam surat 16, ayat 90-91 (Septiadi, Joharudin, Lestari, Fajri, & Khendra, 2020).

Populisme berkaitan erat dengan politik identitas. Keterkaitan populisme dan politik identitas salah satunya tergambar dalam penelitian yang berjudul *Political Identities: The Missing Link in The Study of Populism* (Melendez & Cristobal, 2017). Argumen akademik (theoretical review) Melendez & Cristobal dalam penelitian ini ialah populisme dapat berkembang hanya ketika politik identitas anti-establishment ada (Ardipandanto, 2020). Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia, Politisasi berarti membuat keadaan (perbuatan, gagasan, dan sebagainya) bersifat politis. Dari pengertian ini dapat ditarik sebuah arti, dimana politisasi diartikan sebagai sebuah perbuatan baik berupa gagasan, ide, dan lain sebagainya menjadi bersifat politik. Politisasi agama merupakan instrumentalisasi agama untuk kepentingan politik tertentu. Politisasi agama juga menjadi salah satu konsep penting dalam memahami Teologi Politik seperti Islam Politik, dimana memandang agama memiliki daya fungsional strategis terhadap realitas politik yang ada (Kurniawan, 2018).

Indonesia, disebut sebagai Negara yang memiliki jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. Data *Globalreligiustfuture*, memberi petunjuk angka yang kini bahwa penduduk Indonesia yang beragama Islam pada tahun 2010 mencapai 209,12 juta jiwa, atau sekitar 87 persen dari total populasi. Kemudian diperkirakan akan bertambah dan mencapai angka 229,62 juta jiwa di tahun 2020. Penduduk Muslim terbesar kedua adalah India, yakni 176,2 juta jiwa, sedangkan penduduk Muslim terbesar ke tiga adalah Pakistan yakni sebanyak 167,41 juta jiwa. Sedangkan penduduk Muslim di dunia pada 2010 mencapai 1,6 miliar jiwa atau sekitar 23 persen dari total populasi penduduk dunia mencapai 6,9 miliar 2010. Negara-Negara dengan jumlah Muslim yang tinggi cenderung berada di Afrika, Timur Tengah dan Asia. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 1 table 1.

Data tabel 1 memperlihatkan penduduk Muslim terbesar di dunia dilihat dari populasi penduduk menduduki peringkat pertama. Tentu saja dapat dipastikan Indonesia akan menjadi center of point untuk membahas Agama (Islam) dalam perdebatan politik dunia. Jika saja tesis Huntington menjadi rujukan bahwa benturan peradaban akan menjadi kenyataan diakhir jaman dan Islam akan memenangkan pertarungan itu, bukan liberal berdasarkan tulisan Fukuyama dalam *The end of History Man*, maka sudah dapat dipastikan Indonesia akan dijadikan sebagai objek sasaran untuk mencari pembenaran tersebut. Indonesia pastilah akan menjadi sorotan utama, terutama dalam memaknai demokrasi (liberal) sebagai sistem politik yang tengah melanda Indonesia di pasca Era Reformasi. Realitas politik di Indonesia, memberikan wajah baru yang dianggap terlihat mengagumkan. Data *Democracy Index 2019*, menyebutkan bahwa dari 50 negara yang mayoritas penduduk Muslim, ada 60 persen menerapkan sistem politik bergaya otoriter, sedangkan yang menerapkan full democracy tak ada sama sekali, atau nol persen. Bahkan berdasarkan data hanya tiga Negara Muslim yang menerapkan demokrasi termasuk Indonesia, meskipun demokrasi yang diterapkan tidak full, atau disebut sebagai model demokrasi setengah matang (*flawed democracy*).

Tabel 1. Perbandingan Jumlah Populasi Umat Muslim Antar Negara Negara di Dunia 2020

Country	Muslim Population	Population 2020	Muslim % of Total Population	Muslim % of World Population
Indonesia	229.000.000	275.523.615	87,20	12,70
Pakistan	200.400.000	220.892.340	96,50	11,10
India	195.000.000	1.380.004.385	14,20	10,90
Bangladesh	153.700.000	164.689.383	90,40	9,20
Negeria	99.000.000	206.139.589	49,60	5,30
Egypt	87.500.000	102.334.404	92,35	4,90
Iran	82.500.000	83.992.949	99,40	4,60
Turky	79.850.000	84.339.067	99,20	4,60
Algeria	41.240.913	43.851.004	99,00	2,70
Sudan	39.585.777	43.849.260	97,00	1,90

Sumber: go.muslim.co.id. 2020.

Indonesia menjadi role model demokrasi berpenduduk Muslim terbesar didunia, bahkan memungkinkan akan terjadinya lonjakan besar terhadap hijrahnya banyak Negara Muslim didunia untuk memeluk demokrasi sebagai bentuk actual dalam rangka mencapai kebebasannya. Bahkan *Pew Research Center* (Lembaga Peneliti Berpusat di AS) memprediksi bahwa pada tahun 2070 nanti penduduk Muslim akan menjadi terbanyak di dunia, atau penduduk Muslim akan menjadi populasi terbanyak. Selain Indonesia yang dapat menjadi rolemodel Negara Islam yang terjun ke system politik demokrasi, adalah Negara Turkey sebagai Negara yang memiliki populasi Muslim mayoritas, hanya saja sayangnya Negara ini terjerumus ke Negara beraliran sekuler, sehingga Agama tidak lagi berpengaruh terhadap system pemerintahan. Berbeda dengan Indonesia yakni tetap memegang teguh bahwa Agama harus tetap ikut campur tangan dalam mengurus Negara, melalui idiologi Pancasila yang dibangunnya sendiri dengan tetap mengikat dirinya pada sila pertama yakni Ketuhanan Yang Maha Esa. Afganistan yang memiliki penduduk muslim 99%, menerapkan demokrasi dalam system pemerintahannya, sayangnya tidak menuai keberhasilan, karna negaranya malahan menjadi darah konflik berkepanjangan. Sementara Negara Malaysia, Brunei, Arab Saudi memilih menerapkan Monarkhi. Tentu saja dapat dipahami karena demokrasi menjadi momok bagi Negara-Negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

Meningkatnya arti-penting partai-partai Islam dalam literatur partai politik dan pemilu sejalan dengan munculnya Islam sebagai kekuatan politik di era modern di mana-mana (Abdullah, 2018). Keberadaan partai politik Islam tidak dapat dipisahkan dari identitas keagamaan warga negara tertentu, yang terkait dengan ideologi. Asumsi pendirian partai politik Islam adalah diperlukannya saluran ideologis dalam politik, dan perspektif ini muncul di negara demokrasi. Namun, di negara non-demokrasi, juga ada anggapan bahwa partai politik Islam perlu didirikan. Oleh karena itu, secara sederhana dapat dikatakan bahwa partai politik Islam adalah media untuk mengkonsolidasikan seluruh umat Islam dalam suasana politik (Harahap, 2019). Partai politik Islam adalah partai politik yang secara eksplisit memuat prinsip-prinsip Islam seperti misalnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN). Partai-partai Islam ini memiliki pendukung yang masif, yang sebagian besar berasal dari anggota dan simpatisan ormas Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah (Waluyo, 2020).

Politik massa adalah politik yang dibangun atas dasar pragmatis dan oportunistik Ideology (Iryadi, Zakaria, Hasan, Tabrani, & Ilhamsyah, 2019). Nahdlatul Ulama kerap kali menjadi sorotan publik dan berbagai kelompok- kelompok kepentingan ketika menjelang masa pemilihan umum, baik di tingkat daerah ataupun nasional, baik pemilu eksekutif ataupun legislatif. Hal ini tidak lain dikarenakan Nahdlatul Ulama (NU) yang memiliki basis masa yang sangat besar terutama warga nahdliyin (pengikut Nahdlatul Ulama) yang berada di daerah Jawa, khususnya Jawa Timur dan Jawa Tengah. Hal ini diverifikasi oleh temuan Alvara Research Center pada tahun 2016 yang berjudul "Potret Keberagaman Muslim Indonesia", membeberkan bahwa karakteristik Nahdlatul Ulama sangat "java-centric", dari 79,04 juta jiwa yang mengaku berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama tersebut 79,8% nya adalah penduduk yang tinggal di Pulau Jawa (Arravi, 2021).

Studi ini didasarkan pada argumen bahwa agama adalah instrument yang sangat berpengaruh dalam membentuk suatu tindakan masyarakat. Agama adalah hal yang sangat sensitif dalam kehidupan masyarakat, apalagi masyarakat Indonesia yang sebagian besar adalah umat beragama. Hampir tidak ada ranah kehidupan yang absen dari pengaruh agama, termasuk dunia politik seperti pelaksanaan suksesi kepemimpinan baik pada tingkat legislatif maupun eksekutif, dari pusat hingga daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota). Maka disaat nilai-nilai agama seseorang di hina atau di permainkan itu bisa menimbulkan reaksi atau tindakan dari setiap penganut agama tersebut. Ali Maschan Moesa, dalam bukunya berjudul Nasionalisme Kiai: Konstruksi Sosial

Berbasis Agama, mengatakan, politisasi agama berarti menggunakan simbol-simbol agama untuk menggerakkan massa, mengaduk-aduk emosi keagamaan, menjalin kekuatan di parlemen, dan seterusnya, tetapi tujuannya untuk kepentingan politik, bukan kepentingan agama (Ronaldo & Darmaiza, 2021).

Metode

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah riset kepustakaan (library research) yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat diruangan perpustakaan (Akil Tahir, Sultan, Syamsuddin, & Sabri, 2019). Metode penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif, menggambarkan proses penelitian ini bedarkan dari hasil studi pustaka berupa buku, hasil riset lembaga survey dan konsultan politik (Candramukti, 2020). Penelitian ini tidak hanya mengeksplorasi apa, di mana, dan kapan, tetapi juga mengapa dan bagaimana masalah itu muncul (Khan et al., 2019). Menurut (Creswell, 2007), penelitian kualitatif berupaya mengkonstruksi realitas sosial, berfokus pada proses interpretasi dan peristiwa, kunci utamanya terletak pada keaslian, tidak bebas nilai, terikat pada fenomena dan situasi yang diamati, bersifat analisis tematik serta melibatkan peneliti di dalamnya (Sari, 2020). Metode kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk mencari pengetahuan atau pemahaman berbagai relasi terkait dibalik suatu realitas pada era media baru, studi teks dan dokumentasi berita serta artikel tentang berita hoaks yang dapat mempengaruhi publik dan dapat menghambat serta mempengaruhi substansi demokrasi itu sendiri. Melalui studi teks dan dokumentasi berita serta artikel yang telah dibaca oleh peneliti secara berulang ulang sehingga peneliti dapat membuat sebuah analisis dan deskripsi (Rahman Tahir, Kusmanto, & Amin, 2020).

Hasil dan Pembahasan

Gus Dur, sebagai tokoh Agama yang dikenal dengan nama KH. Abdurrahman Wahid, akhirnya dilengserkan secara Politik oleh parlemen melalui Sidang Istimewa (SI) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI 23 Juli 2001. Pelengseran tersebut tentu saja tidak diterima oleh Gus Dur dan dibantahnya karena dianggap inkonstitusional, bahkan Gus Dur waktu itu mencoba mengulangi masa kejadian di era Sukarno yakni mengeluarkan Dekrit Presiden, menurutnya bukan untuk mempertahankan kuasanya akan tetapi dianggap sebagai bagian perlawanan dari inkonstitusional terhadap dirinya, karena sejumlah tuduhan yang diarahkan kepadanya dianggap tidak terbukti secara hukum. Menyimak Kompas pada tanggal 1 Agustus 2001 melaporkan bahwa pada malam tanggal 22 Juli 2001, Gus Dur sempat mengadakan pertemuan bersama seorang wakil sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Masduki Baidlawi dan tujuh ulama sepuh di Istana Negara. Mereka menyampaikan kepada Gus Dur bahwa ada rencana percepatan Sidang Istimewa MPR pada tanggal 23 Juli 2001. Kondisi di Istana itu dilaporkan berlangsung khidmat dan penuh keharuan. Gus Dur minta maaf jika selama ini tidak melaporkan suasana politik yang dihadapinya, bahkan dilaporkan bahwa waktu itu Gus Dur tak kuasa menahan air matanya. Lewat tengah malam Gus Dur mengeluarkan dekrit presiden yang secara garis besar berisi penolakan terhadap keputusan sidang istimewa yang akan diselenggarakan beberapa jam mendatang oleh MPR yang waktu itu dipimpin oleh Amin Rais. Bahkan di laporkan bahwa saat itu tidak ada satupun keputusan hukum yang memvonis Gus Dur melakukan kesalahan seperti yang dituduhkan kepadanya termasuk kasus *Buloggate* dan *Bruneigate*. Gus Dur sangat kecewa, dan berusaha menahan gejolak amarah para pendukungnya, yang berani mati jika Gus Dur dilengserkan. Namun Gus Dur berhasil meredam gejolak Politik yang menekan dirinya, dan berusaha agar seluruh pendukungnya dari beberapa pesantren menahan langkah mereka untuk melakukan pembelaan politik melalui tekanan massa dari kelompok Agama, dan berpesan tetap tawakkal, dan jangan terpancing amarah atas nama solidaritas umat muslim. Bahkan Gus Dur tidak membolehkan para ulama teralu larut dalam politik. Bahkan dengan tegas Gus Dur meminta ulama, Kyai, dan Santri di lingkungan NU untuk tidak pergi berunjuk rasa dan membuat kegaduhan di Jakarta, dan meminta agar para pendukung tetap meyakini kapabilitas pemerintah dalam menuntaskan persoalan politik di Indonesia. Gus Dur berpesan bahwa, sesama orang Islam itu bersaudara. Kenyataan harus dipahami dan tindakan kekerasan tidak menyelesaikan persoalan. Jika banyak warga NU yang ke Jakarta kemudian membuat geger malah akan menambah keributan di Jakarta.

Fenomena lengsernya Gus dur menjadi satu catatan sejarah penting terhadap dinamika Politik pasca reformasi dibawah kendali Amin Rais yang juga tokoh Agama Muhammadiyah. Meski secara kelembagaan menyatakan diri netral, namun Muhammadiyah memberi kebebasan bagi para anggotanya dalam menentukan sikap politik (Hadisaputra, 2021). Kedua tokoh itu berseteru melalui dua lembaga raksasa di Indonesia, lembaga MPR dan Lembaga Kepresidenan. Tentu sangat menarik untuk disimak, bahwa ada dua tokoh Islam yang sangat memiankan peran strategis waktu itu. Masing masing membawa gerbong besar, Gus dur membawa gerbong NU sedangkan Amin Rais membawa gerbong Muhammadiyah. Skenario Politik Agama waktu itu sangat terlihat kasat mata. Amin Rais yang dikenal sebagai sebagai penggagas reformasi

Politik di Indonesia sukses meruntuhkan kejayaan Orde Baru selama 32 Tahun melalui Soeharto yang kental dengan Kepemimpinan Militerinya. Maka Amin Rais mencoba meruntuhkan Militer melalui yel-yel reformasi militer kembali kebarak. Peta Politik Amin Rais terbaca oleh kalangan intelektual, ambisi kekuasaan tetap nampak dalam dirinya, bahkan kepada wartawan waktu itu siap menjadi Presiden jika terpilih, dan akan mengembangkan demokrasi tanpa embel-embel, dan menurutnya demokrasi dengan embel-embel akan rusak, dengan menunjuk kepada demokrasi terpimpin, lalu demokrasi pancasila juga menurutnya rusak, dan akan memilih demokrasi yang sifatnya universal. Sayangnya waktu itu (1999) partai Amin Rais (Partai Amanat Nasional berlambang Matahari) hanya berhasil meraih 34 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Amin Rais berhasil memainkan strategi manuver lalu dan menciptakan system koalisi dengan menggalang partai-partai Islam dan menyebutnya sebagai Poros Tengah, untuk mengganjal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) (Megawati) sebagai partai pemenang pemilu waktu itu untuk menjadi Presiden. Amin Rais menjadi perancang politik kemenangan poros tengah waktu itu, dan tentu saja ingin memenangkan dirinya.

Sayangnya, pada saat Amin Rais meminta persetujuan pada Gus dur untuk meminta pemimpin yang bisa penengah untuk mencapai stabilitas politik pasca reformasi dan harus dari kalangan mereka sebagai tokoh-tokoh Agama, dan menurut Amin Rais orang tersebut adalah Gusdur (strategi Amin Rais seperti main bola sodok) justru Gus dur malah salah tanggap dan dialah (Gus dur) yang bersedia untuk menjadi pemimpinnya, dan Gusdur bersedia menjadi calon presiden Indonesia. Padahal Amin Rais justru berharap agar bola yang di sodoknya justru menyodok bola lain untuk masuk kelubang. Peta Politik Amin Rais porak poranda, skenario yang disusunnya berantakan dan salah kaprah. Namun strategi Politik tidak berhenti sampai disitu, Amin Rais berhasil menduduki jabatan Ketua majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), sementara Gus Dur terpilih jadi Presiden dan Megawati jadi Wakil Presidennya. Politik tentu saja tidak berjalan linier, meskipun Gus Dur tokoh Agama Islam (NU) dan Amin Rais juga tokoh Agama Islam (Muhammadiyah) dua kekuatan besar ini menorehkan sejarah kekuasaan dan ambisi, bahkan Amin Rais pada setahun kemudian (tahun 2000) mengutarakan kekecewaan atas kinerja Pemerintahan Gus Dur, dan menyatakan poros tengah siap berkoalisi dengan PDIP, akibatnya Parlemen menjadi "gaduh" dan situasi Politik di DPR pun berbalik menentang Gus Dur, dan kemudian menuntut dibentuknya Pansus DPR untuk menyelidiki Bulog Gate dan Brunei Get, dan Gus Dur berhasil dimakzulkan. Meski Peta politik Agama (Islam) waktu itu sangat kasat mata, akan tetapi ambisi kekuasaan tidak mampu mempertahankan keutuhan itu. Megawati pun meneruskan perjalanan kepemimpinan Presiden hingga masa jabatan selesai (Pergantian Antar Waktu pun terjadi lagi, kurang lebih sama nasib Habibie yang juga menjadi presiden meneruskan masa jabatan Soeharto). Masalah Perpolitikan di Indonesia begitu panas kursi presiden diduduki oleh tiga orang yang berbeda (Habibie, Gusdur dan Megawati), yang berlangsung begitu cepat, Habibie menjabat president 21 Mei 1998-20 Oktober 1999 (480 hari/1 tahun 4 bulan), Gusdur 20 Oktober 1999-23 Juli 2001 (602 hari/1 tahun 8 bulan), sedang Megawati 23 Juli 2001-20 Oktober 2004 (1170 hari, 3 tahun 3 bulan). Kondisi politik di Indonesia era Pasca reformasi dengan ketua MPR Amin Rais memperlihatkan suhu politik yang sangat tinggi, pergantian kepemimpinan pemerintahan mengalami tiga kali pergantian dengan waktu yang relatif pendek. Gelombang politik dibawah kendali MPR sangat terasa waktu itu, dibawah kendali tokoh agama Amin Rais. Namun ditengah perjalanan Koalisi keagaamanpun tak mampu bertahan ditengah kuatnya kepentingan kekuasaan, sehingga tak memberi peluang lagi Gus Dur untuk bertahan.

Amin Rais tidak patah semangat, pada pilpres 2004, Amin Rais mencoba keberuntungannya untuk menjadi president pada Pilpres 2004 (untuk pertama kali uji nyali pemilihan presiden secara langsung) melalui Partai Amanat Nasional (PAN) yang dipimpinnya dengan berpasangan dengan Siswono Yudhosodo, Megawati berpasangan dengan Hasyim Muzadi, Wiranto berpasangan Salahuddin Wahid, dan Susilo Bambang Yudhoyono dan Muhammad Yusuf Kalla. Amin Rais dan Siswono Yodhohosodo, dianggap sebagai pasangan tokoh yang mewakili kalangan agamis dan nasionalis. Sayangnya pasangan ini hanya mendapat posisi ke empat di bawah Susilo Bambang Yudoyono (SBY)-Jusuf Kalla (JK), Dan Petarung Agamis ini pertahanannya runtuh di babak pertama.

Kemenangan SBY dan JK tampaknya menjadi tonggak baru demokratisasi di Indonesia. Untuk pertama kalinya rakyat Indonesia dapat memilih presiden dan wakil presiden secara langsung. Sebelum 2004 pemilihan umum di Indonesia hanya dilakukan untuk mengisi legislatif (anggota parlemen) baik di DPR, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan DPRD kabupaten Kota yang menjadi tradisi politik sejak pemilu pertama di tahun 1955. Bahkan selama masa Orde Baru hingga 1999 pun rakyat tak pernah memilih pemimpinnya secara langsung. Terbentuknya lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah merupakan tonggak baru di era reformasi. Lembaga ini kemudian diberi kewenangan untuk menyelenggarakan perhelatan politik Pemilihan Presiden (Pilpres) langsung di 2004. Bahkan pemilu pertama tersebut diadakan dengan dua kali putaran dan menjadi bagian dari rangkaian Sembilan tahap Pemilihan Umum Legislatif 2004. Inilah periode tersibuk KPU, padahal lembaga ini baru saja dibuat dan mendapat tantangan yang sangat berat,

karena harus menyelenggarakan pemilu anggota DPR, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan DPRD, serta pemilu presiden-wakil presiden putaran kedua, atau dua kali putaran.

Terpilihnya SBY dan JK, masih tetap memberi angin segar bagi kaum agamis meskipun JK tidak memiliki gerbong kuat seperti Amin Rais dan Gus Dur. JK dikenal sebagai Pengusaha sukses dari Sulawesi Selatan, pernah jadi menteri di jaman Gus Dur. Ketokohan JK pun sangat familiar di Kelompok Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), sehingga namanya di kalangan mahasiswa Muslim dijamannya bahkan hingga kini. Bahkan dalam berbagai wawancara, JK pernah menyebut HMI setara dengan NU dan Muhammadiyah (12 Meret 2018, Berita, Teropong Senayan), dan mengaku bangga dengan HMI, dan menyebut sebagai asset Negara yang berharga. Lafran Pane sebagai salah satu pendiri HMI pada tanggal 5 Februari 1947, ditetapkan sebagai pemrakarsa berdirinya HMI dan disebut sebagai pendiri HMI, dan bahkan dianugrahi sebagai pahlawan Nasional pada 9 November 2017 di Istana Negara Jakarta oleh Presiden Jokowi. Dua Kali kemenangan JK dalam perhelatan Pilpres, setidaknya kaum agamawan memberi kontribusi, terutama dilakalangan anak muda HMI dan juga dikalangan Tua HMI yang tergabung dalam KAHMI. Dua kekuatan yang dimiliki JK setidaknya memberi ikatan yang kuat terhadap eksisnya Agama dalam elit politik di tingkat Nasional di panggung Pilpres. JK dapat menjadi symbol Agama melalui HMI dan KAHMI, meskipun sesungguhnya JK memiliki kekuatan lebih yakni Pengusaha. Pengusaha dan Agamis akan menjadi sebuah kekuatan besar dan terbukti dua kali pemilihan JK melenggang meskipun hanya menjadi Wakil Presiden saja. Bahkan dari hasil wawancara dengan media JK selalu menang bukan karena partai Golongan Karya (GOLKAR) yang dipimpinnya, bahkan ketika bersama partai GOLKAR justru JK kalah.

Hal tersebut menandakan bahwa kekuatan partai sebagai alat peraup suara ternyata tidak lagi signifikan, terbukti juga dari hasil penelitian dari Lembaga Ilmu Pengetahuan (LIPI) Siti Zuhro menilai bahwa selama ini partai politik Islam cenderung tidak mendapat perolehan suara secara signifikan disetiap pemilu. Di negara berpenduduk mayoritas Muslim, suara untuk Partai politik Islam tidak pernah mendominasi kemenangan pemilu terutama pada pemilu 2014 di Indonesia (Ridwan & Kamarudin, 2019). Dari pemilu ke Pemilu mulai dari 1955, 1956 sampai 2019 menunjukkan bahwa tidak ada peningkatan signifikan dari partai Islam khususnya perolehan suara. Sampai di era reformasi pun partai Islam semakin Ramping dan menyebut Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), PKB, PAN tidak lagi signifikan suaranya. Itu disebabkan oleh partai berbasis Islam lupa dengan nilai ajaran Islam itu sendiri, sehingga umat Islam mengalihkan dukungan kepartai lain (Kompas.com, Ziti Zuhro, dalam diskusi bertajuk Wajah Islam Politik Pasca Pemilu 22019 /29/11/2019). Jadi untuk memenangkan Pilpres sebagai contoh partai politik Islam tidak terlalu relevan lagi untuk menjadi instrument penggerak suara. Akan tetapi bergerak kepada ketokohan seseorang. Para pemilih lebih cenderung berada pada gerbong non partai Islam namun ikut pada basis ikatan tradisional mereka, sebut saja NU ataupun Muhammadiyah, berikut HMI, dan KAHMI.

Pilpres 2014 menjadi titik balik menguatnya pengaruh populisme dalam politik Indonesia seiring dengan munculnya dua figur populis Prabowo Subianto dan Joko Widodo sebagai kontestan utama. Pada masa ini, populisme menjadi kosa kata baru yang banyak diperbincangkan publik dalam diskursus politik. Menariknya, kontestasi ini dipenuhi dengan penggunaan politik populis yang sama-sama menggelorakan retorika nasionalisme, sentimen anti-asing, dan klaim anti-kemapanan. Kendati demikian, ada perbedaan signifikan dalam konfigurasi dan pendekatan populisme karena ditampilkan dengan ciri khas masing-masing (Margiansyah, 2019).

Sejak era Reformasi, Indonesia sudah menggelar empat kali pemilu. Tetapi, pemilu ke lima tahun 2019, khususnya, pemilu presiden (pilpres) memiliki konstelasi politik yang lebih menyita perhatian publik. Sebagaimana diketahui, untuk kedua kalinya Joko Widodo (Jokowi) kembali berhadapan dengan Prabowo Subianto, head to head, untuk memperebutkan kursi presiden. Memanasnya kontestasi pilpres 2019 juga diwarnai dengan polarisasi politik antara kedua kubu pendukung capres. Tak ayal bara pilpres pun cenderung semakin mempertajam timbulnya pembelahan sosial dalam masyarakat (Zuhro, 2019). Pilpres 2019 sebagai salah satu proses berjalannya demokrasi, dimana mempertemukan kembali bertarungnya calon presiden Ir. H. Joko Widodo dan Prabowo. Pilpres 2019 sebagai pengulangan dari 2014, berbeda dengan pilpres 2004 dan 2009. Hal tersebut karena capresnya sama, isunya mirip, sebagian partai utamanya pun sama (Hamdani, Herdiansyah, & Bintari, 2021). Jokowi-Ma^{ru}f Amin didukung 9 partai politik yang memiliki kursi di parlemen maupun tidak, baik itu partai nasionalis maupun partai yang berbasis masa Islam. Sembilan Partai Politik yakni PDIP, PKB, Golkar, Perindo, Nasional Demokrat (NasDem), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan PPP. Sembilan partai politik ini kemudian mendeklarasikan Koalisi Indonesia Kerja. Belakangan muncul juga Partai Islam, Partai Bulan Bintang turut pula bergabung dalam koalisi ini (Addiansyah, 2019).

Gerakan ketokohohan dalam pemilu Pilpres 2019 pun menjadi fakta. Tokoh-tokoh Agamis menjadi laris dikalangan politisi pada nama Ma'ruf Amin salah satu tokoh agama yang dilirik menjadi Cawapres, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini masuk dalam kandidat Cawapres Joko Widodo. Ma'ruf Amin dinilai dapat menjadi salah satu alternative untuk menjembatani seluruh pihak, termasuk pihak alumni 212 yang terbukti mampu menyingkirkan Ahok dan memenangkan Anis Baswedan di tingkat pemilihan Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. Ma'ruf Amin pun dianggap selain menguasai ilmu Agama dan juga tokoh Agama (Agamis) juga dianggap menguasai ilmu ekonomi. Sehingga, Ma'ruf Amin menjadi salah satu calon Wapres Jokowi yang sangat mendapat dukungan dari berbagai kalangan terutama kalangan agamawan. Ma'ruf Amin selain ketua MUI juga menjabat Rais 'Aam PBNU. Pria 75 tahun ini bahkan sempat menjadi anggota pertimbangan presiden bidang hukum antar agama. Ma'ruf sendiri mengaku bersedia bertarung di pilpres jika Negara memanggilnya. Artinya, Ma'ruf Amin sebagai Agamawan dan juga menjadi tokoh dikalangan Agamis bersedia terjun di dalam politik praktis, menjadi satu pertanda bahwa ekspresi politik Agama (Islam) lebih terlihat nyata dalam sebuah figure ketokohan. Selain Ma'ruf Amin, Din Samsudin (Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat) Hidayat Nurwahid dari partai Keadilan Sejahtera juga termasuk dalam bursa pemilihan Cawapres dalam Pilpres 2019. Seperti yang kita ketahui, Hidayat Nurwahid juga adalah merupakan wakil ketua majelis syuroh PKS, tampak pula nama TGB Zainul Majdi (Gubernur Nusa Tenggara Barat) yang merupakan cucu dari pendiri organisasi Islam terbesar di NTB, Nahdaun Wathan (NW) dan pendiri peantren Darun-Nahdlatain yaitu, TGH N Zainudin Abdul Majid (Tuan Guru Pancor). TGB lulusan Ilmu Al-Quran lulusan Universitas Al Ashar Kairoh ikut juga masuk di dalam bursa Cawapres Pilpres 2019. Nama Ustad Abdul Somad pun juga tidak ketinggalan juga masuk ke dalam bursa Cawapres yang digadagadag oleh Prabowo sebagai Cawapres dalam bursa pemilihan Cawapres Pilpres 2019. Mahfud MD juga masuk sebagai tokoh yang dikenal sebagai tokoh Agamis juga masuk dalam bursa Cawapres 2019. Bahkan melahirkan polemic ketika ditetapkan Ma'ruf Amin sebagai Cawapres Pilpres 2019 mendampingi Joko Widodo ketika diumumkan.

Fakta-fakta tersebut di atas dengan masuknya beberapa calon cawapres di dalam bursa politik pertarungan cawapres pilpres 2019 menjadi suatu bukti bahwa potensi agama Islam tidak bisa diremehkan di dalam pertarungan politik elit Nasional di Indonesia. Meskipun banyak mengandung polemick dan meragukan keterpilihan Ma'ruf Amin mendampingi Joko Widodo namun terbukti pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin berhasil memenangkan pertarungan politik 2019 dengan mampu meraup suara mengalahkan Prabowo berpasangan dengan Sandi dengan presentasi kemenangan 55,50% atau 85.607.362 suara, sedangkan perolehan suara Prabowo-Sandi sebanyak 44,50% atau 68.650.239 suara, meskipun perbandingannya tidak mencolok yakni hanya mencapai 11% saja perbedaan presentase tersebut bukanlah perbedaan yang mecolok, akan tetapi terbukti pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin menjadi pemenang.

Pemanfaatan ketokohan kaum agamawan tampaknya menjadi salah satu strategi mendulang suara (vote getter) ternyata cukup terbilang sukses dalam pelaksanaan demokrasi pilpres di Indonesia, bukan hanya pemilu Pilpres 2019, akan tetapi juga terjadi pada pemilu Pilpres sebelumnya meskipun pada kenyataan setelah kemenangan terlihat dengan kasat mata kursi kekuasaan terhadap agamawan terlihat sangat sedikit, akibatnya strategi agama (Islam) untuk memenangkan calon sang penguasa sepertinya hanya menjadi strategi propaganda saja.

Penguatan politik identitas termasuk penguatan politisasi agama menjadi sebuah dampak dari akibat terjadinya pembungkaman kebebasan berekspresi di ruang public (polit) pada era orde baru. Ketika ruang ekspresi politik (demokrasi) dibuka maka Islam pun mendapatkan ruang berekspresi secara politik yang dibuktikan melalui reformasi dengan ketokohan Amin Rais kemudia memunculkan Habibie sebagai presiden pengganti Soeharto yang dikenal juga di kalangan Ijmi dan Habibie juga termasuk dalam kategori agamis yang lahir dari Sulawesi Selatan lalu keudian digeser melalui poros tengah (koalisi partai agamis berideologi Islam) yang ditokohi oleh Amin Rais mendongkrak nama Gus Dur menjadi pemegang "takhta kepresidenan" pasca reformasi lalu kemudian pemilu 2014. Pertama-tama mengadakan pemilu di Indonesia secara langsung menggiring Amin Rais bersama partai PAN untuk mencalonkan diri menjadi presiden Indonesia (didukung kelompok/gerbong Muhammadiyah) namun gagal pada putaran pertama lalu melahirkan pemenang SBY berpasangan dengan JK. JK kemudian menjadi sorotan utama di dalam diskursus politik agamis karena JK bukan hanya dikenal sebagai pengusaha sukses dari Makassar Sulawesi Selatan dan mendapat dukungan real dari kelomok pengusaha seluruh Indonesia namun mendapat juga dukungan dari satu komunitas yang terkenal sangat solid yaitu HMI dan KAHMI. HMI dan KAHMI merupakan gerbong yang menjadi salah satu pendukung dari kaum agamis yang nitabene berasal dari kaum intelektual Islam. Kemenangan dua kali JK pada pemilihan Wapres di dua kali Pilpres adalah dianggap kemenangan kaum agamis juga. Artinya, agama islam dalam ekspresi politik di tingkat elit Nasional tampaknya terbukti menorehkan sejarah keberhasilan meskipun melahirkan banyak masalah. Terutama pada periode Amin Rais menjadi ketua MPR kursi presiden terlihat sangat panas karena hanya dalam waktu 2 tahun terjadi pergeseran dan pergantian presiden. Ekspresi agama

dalam politik tampaknya sangat menarik dalam diskursus ilmiah, karena terbukti ikut memainkan peran di dalam pertarungan politik nasional di Indonesia. Islam bahkan menjadi anak emas atau (masa keemasan) pasca reformasi dan terlihat kelompok Islam memiliki kesempatan besar untuk mengekspresikan kekuatan politik mereka dengan mengartikulasikan agama di ruang publik (politik) di negeri yang berpenduduk muslim terbesar di dunia.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa sejak Indonesia merdeka, Indonesia mengikrarkan diri sebagai Negara yang dibuat oleh rakyat untuk rakyat, dan bukan monarki. Tan Malaka, Tjoroaminoto, Agus Salim, Hatta, Mohammad Natsir, Kartosuwiryo, Nurcholish Madjid, Dawam Raharjo, Kuntowijoyo, Abdurahman Wahid, Amin Rais, adalah merupakan tokoh-tokoh Islam yang telah memberikan kontribusinya yang besar. Mereka bahkan menjadi lambang-lambang demokrasi di Indonesia. Partisipasi aktif mereka terhadap pergerakan politik tanah air dapat dipastikan membantu melegitimasi masyarakat Indonesia yang pro demokratis, dan terus memperkuat koalisi pro demokrasi. Bahkan jika menganalisis elite politik jaman reformasi hingga pasca reformasi saat ini, tokoh-tokoh elite politik Nasional berbasis Agama tampak eksis diatas panggung politik memainkan perannya. Sebut saja tokoh politik seperti Amin Rais (yang menggerakkan gerbong Mahasiswa Muhammadiyah) dalam rangka mendorong perubahan kearah demokrasi, meruntuhkan tirai otoritarian Orde Baru dengan kuasa selama 32 Tahun tanpa memberikan sirkulasi sehat terhadap politik dalam kurung waktu tersebut. Tokoh Habibie Muncul menjadi Presiden reformasi menggantikan Suharto sebagai pengisi antar waktu (PAW). Tentu saja Habibie tidak bisa dianggap enteng dalam mewarnai Politik Islam di era reformasi waktu itu, membawa gerbongnya melalui berbagai organisasi Islam yang dikendarainya sebut saja Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Drama Politik pasca reformasi, terlihat dinahkodai Amin Rais sebagai perancang strategi, Habibie tergeser karena bisa jadi dianggap tidak cukup kuat gerbong Politik Islam (Agama) yang dibawanya, dilengserkan melalui penolakan pertanggung jawaban, efek terlepasnya Timour-Timour melalui referendum menjadi topic hangat waktu itu. Gus Dur pun menjadi tema central yang menarik yang diciptakan melalui strategi poros tengah (dengan gerbong NU-nya yang kuat di belakangnya). Meskipun harus tetap tersungkur disaat Gus Dur meluncurkan 3 perintah yakni, (1). membekukan DPR-MPR, (2). Mengembalikan kedaulatan di tangan rakyat, dan mengambil tindakan serta menyusun badan untuk penyelenggaraan pemilihan umum dalam waktu setahun, dan (3). meyelamatkan reformasi total dari hambatan unsur-unsur Orde Baru dengan cara membekukan partai Golongan Karya (GOLKAR) sambil menunggu keputusan Mahkamah Agung.

Referensi

- Abdullah, Walid Jumblatt. (2018). Inclusion-moderation or political opportunity? Lessons from the case of Parti Islam Se-Malaysia (Pan-Malaysian Islamic Party, PAS). *Commonwealth & Comparative Politics*, 56(4), 407–426.
- Addiansyah, M. N. (2019). Koalisi Partai Politik Islam Pada PILPRES 2019: Antara Ideologis dan Pragmatis. *Jurnal Pemikiran Politik Islam Politea*, 2(2), 189–198.
- Akil, H. M., Lamba Sultan, H., Syamsuddin, Darussalam, & Sabri, Moh. (2019). Direct Election System In City of Makassar In Islamic Law Perspective, *Direct Election System In City of Makassar In Islamic Law Perspective. Journal of Research and Multidisciplinary*, 2(1), 71–83. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/jrm.v2i1.%25>
- Aprilia, Resti. (2021). Orang kuat lokal dalam pemilu legislatif tahun 2019 (Studi pada kemenangan calon legislatif daerah pemilihan 4 Kabupaten Bangka). Universitas Bangka Belitung.
- Ardipandanto, Aryojati. (2020). Dampak Politik Identitas Pada Pilpres 2019: Perspektif Populisme [The Impact of Identity Politics On President Election 2019: Populism Perspective]. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 11(1), 43–63.
- Arravi, Muhammad Akmal. (2021). Partisipasi Politik Dan Perilaku Memilih Santri Di Wilayah Nahdlatul Ulama (Nu) Lasem Kabupaten Rembang Dalam Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019. *Journal of Politic and Government Studies*, 10(3), 311–327.
- Candramukti, Febrihada Gahas. (2020). Peranan Agama Dalam Menyikapi Konflik Komunal pada Pilpres 2019. *ENTITA: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(2), 245–256.
- Hadisaputra, Hadisaputra. (2021). Etnografi Politik Muhammadiyah Sulawesi Selatan dalam Pemilu 2019. *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, 7(3), 328–343.
- Hamdani, Randi, Herdiansyah, Ari Ganjar, & Bintari, Antik. (2021). Partisipasi Politik Pemuda Dalam Pemilu; Studi Kasustentang Relawan Solidaritas Ulama Muda Jokowi (Samawi) Pada Pemilihan Presiden 2019 Di Kota Tasikmalaya. *Aspirasi*, 11(2), 1–19.

- Hara, Abubakar Eby, & Trihartono, Agus. (2019). The Failure of Islamic Populism: The Case of Indonesia's 2019 Election. 1st Annual International Conference on Social Sciences and Humanities (AICOSH 2019), 283–287. Atlantis Press.
- Harahap, Husnul Isa. (2019). Islamic Political Parties in Southeast Asia: The Origin and Political Problems. *Humanities & Social Sciences Reviews*, 7(5), 481–489.
- Hermawan, Iyep Candra. (2020). Implementasi Pendidikan Politik Pada Partai Politik di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Politik, Hukum Dan Kewarganegaraan*, 10(1).
- Iryadi, Irfan, Zakaria, Mursyidin, Hasan, Effendi, Tabrani, Dedy, & Ilhamsyah, Fadhil. (2019). Muslim and Democracy: A Reflection from 2012 Aceh's Gubernatorial Election. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 545–555.
- Khan, Mohsin Hassan, Adnan, Hamed Mohd, Kaur, Surinderpal, Khuhro, Rashid Ali, Asghar, Rohail, & Jabeen, Sahira. (2019). Muslims' representation in Donald Trump's anti-Muslim-Islam statement: A critical discourse analysis. *Religions*, 10(2), 115.
- Kurniawan, Budi. (2018). Politisasi Agama di Tahun Politik: Politik Pasca-Kebenaran di Indonesia dan Ancaman bagi Demokrasi. *Jurnal Sosiologi Agama*, 12(1), 133–154.
- Mahmudah, Afif Hidayatul, Mubarak, Faisol, & Himmah, Faiqatul. (2021). Konsep Waliyu Al-Amri Al-Daruri Bisysyaukah sebagai Legalitas Keabsahan Pemilihan Umum di Indonesia. *Rechtenstudent Journal UIN KHAS Jember*, 2(1), 46–59.
- Margiansyah, Defbry. (2019). Populisme di Indonesia Kontemporer: Transformasi Persaingan Populisme dan Konsekuensinya dalam Dinamika Kontestasi Politik Menjelang Pemilu 2019. *Jurnal Penelitian Politik*, 16(1), 47–68.
- Pulungan, Muhammad Choirullah, Rahmatunnisa, Mudiwati, & Herdiansah, Ari Ganjar. (2020). Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu Serentak Tahun 2019. *Politea: Jurnal Politik Islam*, 3(2), 251–272.
- Ridwan, Reztya, & Kamarudin, Kamarudin. (2019). Defense Factors of Islamic Political Parties in Election (Comparative study of Malaysian Islamic Parties (PAS) in Malaysia 2013 and the Prosperous Justice Party (PKS) di Indonesia 2014). *First International Conference on Administration Science (ICAS 2019)*, 412–416. Atlantis Press.
- Ronaldo, Riki, & Darmaiza, Darmaiza. (2021). Politisasi Agama dan Politik Kebencian pada Pemilu Presiden Indonesia 2019. *Indonesian Journal of Religion and Society*, 3(1), 33–48.
- Sari, Genny Gustina. (2020). Hiperealitas Media Pada Pemilihan Umum Indonesia Tahun 2019. *Communicology: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 8(1), 84–94.
- Septiadi, Muhammad Andi, Joharudin, Agus, Lestari, Nadia Ginan, Fajri, Rully Reinali, & Khendra, Muhammad. (2020). Halal Politics Role in the Fight against Vote-Buying and Hoaxes. *Indonesian Journal of Halal Research (IJHAR)*, 2(2), 33–39.
- Steiner, Kerstin. (2018). Malaysia at the crossroads? The never-ending discourse between Islam, law, and politics. *Journal of Religious and Political Practice*, 4(3), 256–277.
- Tahir, Akil, Sultan, Lamba, Syamsuddin, Darussalam, & Sabri, Moh. (2019). Direct Election System In City of Makassar In Islamic Law Perspective. *Journal of Research and Multidisciplinary*, 2(1), 71–83.
- Tahir, Rahman, Kusmanto, Heri, & Amin, Muryanto. (2020). Propaganda Politik Hoaks dalam Pemilihan Presiden Tahun 2019. *PERSPEKTIF*, 9(2), 236–251.
- Waluyo, Tri Joko. (2020). The changing political orientation of Air Tiris, Kampar, Riau community towards Islamic political parties in general elections (a case study: general elections in Indonesia). *Journal of Islamic Marketing*.
- Yanuarti, Sri. (2018). Militer dan Pemilu-pemilu di Indonesia. *Jurnal Penelitian Politik*, 15(2), 233–248.
- Zuhro, R. Siti. (2019). Demokrasi dan pemilu Presiden 2019. *Jurnal Penelitian Politik*, 16(1), 69–81.